



Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Gayos Alfajri^{1*}, Afrizal², Doni Syahputra³, Musthofa Habli⁴

Universitas Rokania

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4087>

*Correspondence: Gayos Alfajri

Email: gayosalfajri@rokania.ac.id

Received: 28-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 06-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui commitment, complexity, dan credibility dari kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Sungai Dua Indah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan penelitian menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dengan desain deskriptif. Sampel terdiri dari 12 informan yang dipilih secara sensus, meliputi kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan validasi data dilakukan melalui member check. Analisis data diarahkan pada reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa: (1) Commitment kepala desa perempuan tercermin dalam konsistensi kebijakan, peningkatan pelayanan dan pembangunan, serta sifat dermawan; (2) Complexity dipengaruhi oleh aspek sosial-budaya dan keluarga; (3) Credibility terbangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi pada ilmu pemerintahan, khususnya dalam memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat desa.

Kata kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Perempuan

Abstract: This study aims to determine the commitment, complexity, and credibility of the leadership of female village heads in Sungai Dua Indah Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. The research approach combines qualitative and quantitative methods with descriptive design. The sample consisted of 12 informants selected by census, including village heads, village officials, and community leaders. Data collection techniques include questionnaires, observations, interviews, and documentation, while data validation is carried out through member checks. Data analysis is directed at reduction, presentation, and drawing conclusions. The results show that: (1) The commitment of female village heads is reflected in policy consistency, improvement of services and development, and generosity; (2) Complexity is influenced by socio-cultural and family aspects; (3) Credibility is built through transparency, accountability, and public trust. These findings contribute to government science, particularly in strengthening women's leadership at the village level.

Keywords: Leadership, Village Head, Women

Pendahuluan

Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu faktor strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya lokal, merancang program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. Kebijakan desentralisasi tersebut menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki otonomi dalam menentukan arah pembangunan sesuai

karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks tersebut, kepala desa memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa ([Nurcholis, 2017](#)).

Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam membangun komunikasi sosial, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan potensi desa secara berkelanjutan. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang mampu membangun legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan desa menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia, partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa mulai memperoleh perhatian yang lebih besar. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan pengarusutamaan gender terus mendorong keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif. ([Kementerian Dalam Negeri Republik, 2020](#)) menegaskan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa merupakan bagian penting dari penguatan demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik dinilai mampu menghadirkan pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan masyarakat rentan.

Meskipun demikian, representasi perempuan dalam jabatan kepala desa masih tergolong rendah. Berdasarkan data ([Badan Pusat Statistik, 2021](#)), hanya sekitar 14,4% kepala desa di Indonesia yang dijabat oleh perempuan. Rendahnya keterwakilan perempuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, sosial, dan budaya dalam memperoleh akses terhadap kepemimpinan politik di tingkat lokal. Dalam masyarakat pedesaan yang masih dipengaruhi budaya patriarki, kepemimpinan publik umumnya masih dipersepsikan sebagai domain laki-laki, sedangkan perempuan lebih sering diposisikan dalam ranah domestik. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan yang menduduki jabatan publik sering menghadapi stereotip gender, resistensi sosial, serta keraguan terhadap kapasitas kepemimpinannya.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perempuan dalam posisi kepemimpinan desa menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses terhadap jaringan politik, rendahnya dukungan sosial, serta budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat ([Mitrani & Arifin, 2020](#)). ([Fakih, 2013](#)) menjelaskan bahwa budaya patriarki telah membentuk ketimpangan relasi gender yang memengaruhi akses perempuan terhadap ruang publik dan kekuasaan politik. Di sisi lain, penelitian ([Eagly & Carli, 2007](#)) menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan kolaboratif, sehingga berpotensi menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dalam proses pembangunan.

Namun demikian, kajian mengenai kepemimpinan perempuan di tingkat pemerintahan desa masih memiliki sejumlah keterbatasan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek representasi politik perempuan dan hambatan perempuan dalam memperoleh jabatan publik, sementara kajian mengenai efektivitas kepemimpinan perempuan setelah menduduki jabatan kepala desa masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cakupan wilayah yang luas pada tingkat nasional atau provinsi, sehingga cenderung menghasilkan gambaran yang bersifat umum dan belum mampu menjelaskan dinamika sosial secara mendalam pada konteks desa tertentu ([Setiawan & Nugroho, 2022](#)).

Keterbatasan lain dari penelitian sebelumnya adalah minimnya kajian yang mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan politik dalam menganalisis kepemimpinan kepala desa perempuan. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada isu gender secara umum tanpa melihat bagaimana karakteristik masyarakat desa, budaya lokal, pola hubungan sosial, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat memengaruhi legitimasi dan efektivitas kepemimpinan perempuan. Padahal, dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih dipengaruhi budaya patriarki, penerimaan sosial terhadap perempuan sebagai pemimpin menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan kepemimpinan desa.

Selain itu, penelitian mengenai kepemimpinan kepala desa perempuan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat terbatas, khususnya pada Desa Sungai Dua Indah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Desa Sungai Dua Indah merupakan desa agraris dengan mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Kondisi sosial masyarakat desa masih ditandai dengan kuatnya nilai gotong royong, hubungan kekerabatan, musyawarah, serta budaya tradisional yang cukup kental. Karakteristik masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki menjadikan kepemimpinan perempuan sebagai fenomena yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks legitimasi sosial dan efektivitas pemerintahan desa.

Di sisi lain, Desa Sungai Dua Indah memiliki berbagai potensi desa yang cukup besar, antara lain sektor perkebunan, pertanian rakyat, usaha mikro masyarakat, serta modal sosial berupa partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Dalam beberapa tahun terakhir, desa ini juga menunjukkan capaian pembangunan yang cukup baik, terutama pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa. Capaian tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan kepala desa perempuan, yaitu Ibu Umi Kalsum yang terpilih pada tahun 2019 dan dinilai mampu membangun komunikasi partisipatif serta pendekatan sosial yang inklusif dalam tata kelola pemerintahan desa.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kondisi empiris yang menarik, yaitu bagaimana seorang kepala desa perempuan mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif di tengah masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait kepemimpinan perempuan di tingkat desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek representasi politik perempuan secara

umum, penelitian ini secara khusus menganalisis legitimasi sosial, strategi kepemimpinan, efektivitas pemerintahan, serta dampak kepemimpinan kepala desa perempuan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks sosial-budaya masyarakat Desa Sungai Dua Indah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kepemimpinan kepala desa perempuan. Pendekatan ini dipilih agar penelitian tidak hanya menghasilkan gambaran statistik mengenai persepsi masyarakat, tetapi juga mampu menjelaskan pengalaman sosial, dinamika budaya, dan praktik kepemimpinan yang terjadi secara empiris di tingkat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi legitimasi dan efektivitas kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Sungai Dua Indah.
2. Menganalisis strategi kepemimpinan yang diterapkan kepala desa perempuan serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan desa di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan legitimasi sosial, budaya patriarki, dan efektivitas kepemimpinan lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik lokal serta menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kepemimpinan kepala desa perempuan melalui integrasi data kuantitatif dan kualitatif ([Creswell & Plano Clark, 2018](#)). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat secara terstruktur terhadap dimensi commitment, complexity, dan credibility, sedangkan pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk menggali secara mendalam konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi praktik kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Sungai Dua Indah. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya memperoleh gambaran statistik mengenai persepsi masyarakat, tetapi juga memahami makna, pengalaman, dan dinamika kontekstual yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

Populasi penelitian mencakup seluruh penduduk Desa Sungai Dua Indah yang berjumlah sekitar 2.500 jiwa. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berbasis sensus terbatas terhadap informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam tata kelola pemerintahan desa. Kriteria informan meliputi: (a) kepala desa perempuan sebagai subjek utama penelitian, (b)

perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, bendahara, dan kepala bidang, serta (c) tokoh masyarakat yang mencakup kepala adat dan pemuka agama. Berdasarkan kriteria tersebut, total informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok tersebut memiliki posisi strategis dalam memahami implementasi kepemimpinan desa, tantangan struktural, serta tingkat legitimasi sosial yang dimiliki kepala desa perempuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu kuesioner, wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Kuesioner menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi responden terhadap tiga dimensi utama penelitian, yaitu *commitment*, *complexity*, dan *credibility*, dengan instrumen yang diadaptasi dari (F. M. Djenaan et al., 2024). Instrumen ini dirancang untuk menghasilkan data kuantitatif mengenai tingkat komitmen kepala desa terhadap pembangunan, kompleksitas tantangan yang dihadapi, serta kredibilitas kepemimpinan berdasarkan persepsi masyarakat. Selanjutnya, wawancara semi-terstruktur dilakukan guna memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam mengenai kebijakan kepemimpinan, hambatan sosial-budaya, dinamika gender, dan tingkat kepercayaan publik. Pedoman wawancara disusun secara sistematis agar tetap fleksibel dalam mengeksplorasi pengalaman informan sekaligus menjaga konsistensi fokus penelitian. Observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan musyawarah desa, forum pembangunan, dan aktivitas pemerintahan lainnya untuk menangkap interaksi sosial, pola komunikasi, serta praktik kepemimpinan secara langsung. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai sumber data sekunder melalui analisis terhadap risalah rapat desa, laporan keuangan, dan dokumen program pembangunan yang relevan.

Untuk menjamin validitas internal penelitian, peneliti menerapkan teknik *member check* sebagaimana dikemukakan oleh (Lincoln & Guba, 1985), yaitu dengan mengonfirmasi kembali transkrip wawancara, interpretasi data, serta hasil analisis sementara kepada informan utama guna memastikan kesesuaian antara pengalaman informan dan interpretasi peneliti. Teknik ini penting untuk meningkatkan kredibilitas temuan, meminimalkan bias interpretatif, serta memastikan bahwa hasil penelitian merepresentasikan kondisi empiris secara akurat. Selain itu, triangulasi metode melalui penggabungan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat reliabilitas data.

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif berupa mean dan standar deviasi melalui perangkat lunak SPSS versi 26, dengan tujuan menggambarkan kecenderungan umum persepsi masyarakat terhadap dimensi *commitment*, *complexity*, dan *credibility*. Sementara itu, data kualitatif dianalisis secara tematik berdasarkan tahapan yang dikemukakan (Creswell, 2014), yang meliputi tiga proses utama. Pertama, reduksi data dilakukan melalui proses transkripsi, pengkodean, dan seleksi data lapangan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan. Kedua, penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan kode-kode ke dalam kategori tematik berdasarkan tiga dimensi utama penelitian, yaitu *commitment*, *complexity*, dan *credibility*. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan melalui integrasi antara temuan kuantitatif dan kualitatif guna menghasilkan

interpretasi yang holistik. Dengan pendekatan analisis ini, penelitian mampu menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan kepala desa perempuan dijalankan, diterima, dan dipersepsikan dalam konteks sosial-budaya masyarakat Desa Sungai Dua Indah.

Hasil dan Pembahasan

Commitment (Komitmen Kepemimpinan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi *commitment* merupakan salah satu kekuatan utama dalam kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Sungai Dua Indah. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, sebanyak 85% responden menilai bahwa kepala desa perempuan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dalam menjalankan kebijakan pemerintahan dan pembangunan desa dengan nilai rata-rata (Mean = 4,2) pada skala Likert 1–5. Konsistensi tersebut tercermin melalui keberlanjutan program pembangunan, kepatuhan terhadap visi pembangunan desa, serta stabilitas implementasi kebijakan yang tidak mudah berubah akibat tekanan politik maupun sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan kepala desa perempuan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan desa.

Selain itu, sebanyak 78% responden menyatakan bahwa sejak dipimpin oleh kepala desa perempuan, kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada sektor perbaikan jalan desa dan fasilitas kesehatan dasar dengan nilai rata-rata (Mean = 4,0). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan diwujudkan melalui hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tidak hanya dalam aspek formal pemerintahan, komitmen tersebut juga tercermin dalam dimensi sosial-kemanusiaan. Sebanyak 90% informan mengakui bahwa kepala desa secara aktif memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, baik dalam bentuk dukungan material maupun fasilitasi kebutuhan sosial masyarakat dengan nilai rata-rata (Mean = 4,5). Sikap responsif dan kepedulian sosial tersebut memperkuat legitimasi moral kepala desa sebagai pemimpin yang tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi pemerintahan, tetapi juga hadir sebagai figur sosial yang dekat dengan masyarakat.

Secara interpretatif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *commitment* kepala desa perempuan dibangun melalui kombinasi antara konsistensi kebijakan, orientasi pelayanan publik, dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Dalam konteks masyarakat desa yang masih dipengaruhi budaya patriarki, pembuktian kinerja dan keberhasilan pembangunan menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi kepemimpinan perempuan. Kepala desa perempuan tampaknya menyadari bahwa penerimaan masyarakat tidak cukup diperoleh melalui legitimasi formal hasil pemilihan kepala desa, tetapi juga harus diperkuat melalui konsistensi pelayanan publik dan keterlibatan langsung dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, kepala desa perempuan secara aktif melakukan pendekatan interpersonal melalui kunjungan sosial, keterlibatan dalam kegiatan adat dan keagamaan, serta komunikasi langsung dengan masyarakat. Pendekatan

tersebut menjadi strategi sosial untuk memperkuat hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat sekaligus mengurangi resistensi gender yang masih berkembang dalam lingkungan sosial pedesaan. Dalam perspektif *transformational leadership*, pola kepemimpinan tersebut mencerminkan kemampuan pemimpin dalam membangun hubungan emosional (*emotional bonding*), kepercayaan sosial, dan inspirasi kolektif melalui pendekatan partisipatif dan humanis (Bass, 2020).

Dengan demikian, commitment kepala desa perempuan dalam penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan desa, tetapi juga menjadi instrumen sosial-politik dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat melalui praktik kepemimpinan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (R. Djenaan et al., 2024) yang menegaskan bahwa konsistensi kebijakan dan kedekatan sosial pemimpin menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas pemerintahan desa.

Complexity (Kompleksitas Kepemimpinan)

Meskipun menunjukkan tingkat commitment dan credibility yang tinggi, hasil penelitian juga mengungkap bahwa kepala desa perempuan menghadapi tingkat complexity yang cukup tinggi dalam menjalankan kepemimpinannya. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pemerintahan desa, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-budaya, konstruksi gender, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat pedesaan.

Dalam konteks Desa Sungai Dua Indah, masyarakat masih dipengaruhi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam ruang publik dan pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menyebabkan kepala desa perempuan menghadapi tantangan legitimasi sejak awal masa kepemimpinannya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, beberapa informan menyatakan bahwa pada tahap awal kepemimpinan terdapat keraguan sebagian masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin pemerintahan desa. Keraguan tersebut muncul dalam bentuk stereotip bahwa perempuan dianggap kurang tegas dalam mengambil keputusan strategis dan lebih sesuai menjalankan peran domestik dibandingkan memimpin ruang publik.

Secara interpretatif, resistensi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu resistensi simbolik, resistensi partisipatif, dan resistensi kultural. Resistensi simbolik terlihat dari munculnya stereotip gender yang mempertanyakan kapasitas perempuan sebagai pemimpin desa. Resistensi partisipatif tampak dari sikap sebagian masyarakat yang pada awalnya kurang aktif menghadiri forum musyawarah desa serta menunjukkan keraguan terhadap kebijakan yang disampaikan kepala desa perempuan. Sementara itu, resistensi kultural terlihat melalui dominasi tokoh laki-laki dalam proses pengambilan keputusan informal desa yang secara tidak langsung membatasi ruang otoritas kepala desa perempuan. Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan kepemimpinan perempuan di tingkat desa tidak hanya berasal dari struktur birokrasi pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial gender yang telah mengakar dalam budaya masyarakat desa.

Selain menghadapi resistensi sosial, kepala desa perempuan juga mengalami konflik gender dalam praktik kepemimpinannya. Konflik gender tersebut muncul ketika kepala desa dituntut menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pemimpin publik dan sebagai perempuan yang tetap dibebani tanggung jawab domestik oleh masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih menilai keberhasilan perempuan tidak hanya berdasarkan kapasitas kepemimpinan publiknya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menjalankan peran keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan kepala desa perempuan menghadapi tekanan sosial yang lebih besar dibandingkan pemimpin laki-laki. Temuan ini sejalan dengan ([Rahmawati, 2022](#)) yang menjelaskan bahwa perempuan dalam posisi kepemimpinan publik sering mengalami *role conflict* akibat adanya standar sosial ganda terhadap perempuan dalam jabatan publik.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kepala desa perempuan mampu mengatasi konflik gender dan resistensi sosial melalui strategi negosiasi sosial yang adaptif dan partisipatif. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah membangun komunikasi interpersonal secara intensif dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan desa. Kepala desa tidak menggunakan pendekatan konfrontatif terhadap budaya patriarki, melainkan memilih pendekatan persuasif dengan tetap menghormati struktur sosial lokal. Strategi tersebut diwujudkan melalui pelibatan tokoh masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan desa dan proses pengambilan keputusan sehingga tercipta rasa memiliki terhadap kebijakan desa.

Selain itu, kepala desa perempuan juga menggunakan strategi pembuktian kinerja (*performance legitimacy*) untuk mengatasi konflik gender dan membangun legitimasi sosial. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa, keterbukaan pengelolaan anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, legitimasi kepemimpinan perempuan dibangun melalui hasil kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Strategi tersebut secara perlahan mengubah persepsi masyarakat dari keraguan berbasis gender menjadi penerimaan berbasis kapasitas dan kinerja.

Kepala desa perempuan juga menerapkan pendekatan sosial-humanis melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, kegiatan keagamaan, serta kunjungan langsung kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi maupun persoalan sosial lainnya. Pendekatan tersebut memperkuat hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat sehingga resistensi sosial dapat diminimalkan secara bertahap. Temuan ini memperkuat pendapat ([Krook & O'Brien, 2012](#)) yang menjelaskan bahwa perempuan pemimpin di tingkat lokal cenderung menggunakan strategi *informal negotiation* dan *community engagement* untuk memperoleh legitimasi dalam masyarakat yang masih didominasi budaya patriarki.

Dengan demikian, complexity dalam kepemimpinan kepala desa perempuan pada penelitian ini tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai proses negosiasi sosial dan budaya yang berlangsung secara terus-menerus. Efektivitas kepemimpinan perempuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik gender, membangun komunikasi sosial, serta

mentransformasikan resistensi masyarakat menjadi dukungan sosial melalui pendekatan partisipatif dan interpersonal.

Credibility (Kredibilitas Kepemimpinan)

Dimensi credibility dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Sebanyak 82% masyarakat menilai bahwa proses perencanaan dan pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat diakses oleh publik. Transparansi tersebut diwujudkan melalui forum musyawarah desa, keterbukaan informasi program pembangunan, serta penyampaian prioritas anggaran secara partisipatif. Selain itu, kepala desa secara periodik menyampaikan laporan hasil pembangunan dalam forum desa sehingga menghasilkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dengan nilai rata-rata (Mean = 4,3).

Tingkat kepercayaan publik terhadap kepala desa perempuan mencapai 88% dengan nilai rata-rata (Mean = 4,4). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kredibilitas kepemimpinan dibangun melalui kombinasi antara integritas personal, transparansi kelembagaan, dan konsistensi pelayanan publik. Secara interpretatif, credibility kepala desa perempuan dalam penelitian ini tidak hanya dibentuk melalui legitimasi formal sebagai pemimpin desa, tetapi juga melalui praktik pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa perempuan juga dipengaruhi oleh keberhasilan kepala desa dalam mengelola resistensi sosial dan konflik gender secara adaptif. Transparansi pengelolaan anggaran desa dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi publik. Dalam konteks masyarakat desa yang sebelumnya meragukan kapasitas perempuan sebagai pemimpin, praktik pemerintahan yang akuntabel menjadi bukti konkret bahwa perempuan mampu menjalankan pemerintahan secara profesional dan bertanggung jawab.

Selain itu, kepala desa perempuan membangun credibility melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa menciptakan rasa kepercayaan dan memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah desa. Temuan ini mendukung argument ([Koster & de la Fuente, 2021](#)) yang menjelaskan bahwa kredibilitas pemimpin lokal sangat ditentukan oleh partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas kelembagaan.

Dalam perspektif kepemimpinan gender, credibility kepala desa perempuan juga terbentuk melalui kemampuan membangun relasi sosial yang dekat dengan masyarakat. Pendekatan interpersonal, komunikasi langsung, dan keterlibatan sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi kepemimpinan perempuan. Hal ini sejalan dengan laporan ([Women, 2021](#)) yang menegaskan bahwa perempuan pemimpin lokal cenderung memperoleh tingkat kepercayaan publik yang tinggi ketika mampu membangun kedekatan sosial dan komunikasi partisipatif dengan masyarakat.

Dengan demikian, credibility kepala desa perempuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan perempuan tidak hanya ditentukan oleh

representasi gender, tetapi oleh kemampuan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Implikasi Teoritis dan Empiris

a. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa melalui integrasi tiga dimensi utama, yaitu *commitment*, *complexity*, dan *credibility*, sebagai kerangka analitis dalam memahami efektivitas kepemimpinan perempuan di tingkat lokal. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan perempuan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif dalam menjalankan pemerintahan desa, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam melakukan negosiasi sosial, mengelola konflik gender, membangun komunikasi partisipatif, serta menciptakan legitimasi sosial di tengah masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki ([Koster & de la Fuente, 2021](#)). Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian nasional yang menjelaskan bahwa keberhasilan perempuan dalam kepemimpinan lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptif dalam menghadapi tekanan sosial-budaya dan konstruksi gender yang berkembang dalam masyarakat pedesaan ([Setiawan & Nugroho, 2022](#)).

Penelitian ini juga memperkuat perspektif *transformational leadership* dan *gender leadership* yang menjelaskan bahwa perempuan pemimpin cenderung menggunakan pendekatan interpersonal, partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kedekatan sosial dalam membangun legitimasi kepemimpinan (Bass, 2020). Dalam konteks pemerintahan desa, pendekatan tersebut tercermin melalui keterlibatan aktif kepala desa perempuan dalam kegiatan sosial masyarakat, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penerapan pola komunikasi yang persuasif dan dialogis. Pendekatan tersebut mampu memperkuat hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat sehingga menciptakan tingkat partisipasi dan kepercayaan publik yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian internasional yang dilakukan oleh ([Women, 2021](#)) yang menyatakan bahwa perempuan pemimpin lokal cenderung lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat ketika menerapkan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas.

Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa resistensi terhadap kepemimpinan perempuan di tingkat desa merupakan bagian dari dinamika relasi kekuasaan dan konstruksi budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat pedesaan. Resistensi tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk stereotip gender dan keraguan terhadap kapasitas perempuan dalam memimpin, tetapi juga terlihat melalui dominasi laki-laki dalam struktur pengambilan keputusan informal desa. Dalam kondisi tersebut, kepala desa perempuan dituntut memiliki kemampuan negosiasi sosial, strategi komunikasi politik, dan pendekatan interpersonal yang efektif agar mampu memperoleh legitimasi sosial dari

masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian ([Krook & O'Brien, 2012](#)) yang menjelaskan bahwa perempuan pemimpin di tingkat lokal umumnya menghadapi hambatan struktural dan budaya sehingga memerlukan strategi *informal negotiation* dan *community engagement* dalam membangun legitimasi kepemimpinan. Penelitian nasional terbaru juga menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat lokal masih menghadapi tantangan berupa bias gender, keterbatasan akses politik, dan resistensi budaya patriarki yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa ([Mitrani & Arifin, 2020](#)).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam mengelola relasi sosial, membangun legitimasi budaya, serta mentransformasikan resistensi sosial menjadi dukungan masyarakat melalui pendekatan partisipatif, komunikatif, dan kolaboratif. Temuan penelitian ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat desa merupakan bagian dari proses transformasi sosial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kepala desa perempuan merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan perempuan di tingkat pemerintahan desa. Penguatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada manajemen konflik sosial-budaya, strategi negosiasi gender, komunikasi politik lokal, serta kemampuan dalam menyeimbangkan peran domestik dan peran publik. Kebutuhan terhadap penguatan kapasitas tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan pemimpin di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan berupa resistensi sosial, stereotip gender, serta tekanan budaya patriarki yang berpotensi memengaruhi efektivitas kepemimpinan mereka ([Mitrani & Arifin, 2020](#)). Oleh karena itu, kemampuan melakukan negosiasi sosial dan membangun komunikasi partisipatif menjadi faktor penting dalam menciptakan legitimasi sosial dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di tingkat desa.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan kelembagaan bagi perempuan pemimpin desa melalui penyediaan program pelatihan kepemimpinan, penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa, serta perluasan ruang partisipasi politik yang lebih inklusif bagi perempuan. Dukungan kelembagaan tersebut diperlukan agar perempuan pemimpin desa memiliki kemampuan yang lebih adaptif dalam menghadapi resistensi sosial dan tekanan budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat pedesaan. Temuan ini sejalan dengan laporan ([Women, 2021](#)) yang menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan perempuan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh dukungan

kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam tata kelola pemerintahan lokal.

Di samping itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik perlu terus diperkuat karena terbukti menjadi instrumen penting dalam membangun *credibility* dan legitimasi kepemimpinan perempuan di tingkat desa. Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa serta keterbukaan informasi publik mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa ([Koster & de la Fuente, 2021](#)). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam memperkuat legitimasi sosial terhadap kepemimpinan perempuan di tingkat lokal.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian ([R. Djenaan et al., 2024](#)) yang menjelaskan bahwa efektivitas pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, keterbukaan informasi publik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penguatan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel menjadi langkah strategis dalam mendukung keberhasilan kepemimpinan perempuan sekaligus menciptakan pemerintahan desa yang lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada satu wilayah penelitian, yaitu Desa Sungai Dua Indah, sehingga generalisasi hasil penelitian ke wilayah lain perlu dilakukan secara hati-hati. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik sosial, budaya, politik, dan pola kepemimpinan pada setiap desa yang dapat memengaruhi dinamika kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa. Dalam pendekatan penelitian kualitatif dan *mixed methods*, hasil penelitian pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial tempat penelitian dilakukan sehingga temuan penelitian cenderung bersifat kontekstual dan tidak selalu dapat digeneralisasikan secara luas ([Creswell & Plano Clark, 2018](#)). Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai representasi empiris mengenai dinamika kepemimpinan kepala desa perempuan dalam masyarakat pedesaan yang masih dipengaruhi budaya patriarki.

Kedua, penggunaan pendekatan sensus terhadap informan kunci dalam penelitian ini berpotensi menimbulkan *social desirability bias*, yaitu kecenderungan responden untuk memberikan jawaban yang lebih positif atau lebih dapat diterima secara sosial terhadap kepala desa perempuan sebagai pemimpin desa. Kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sosial yang dekat antara informan dan kepala desa, serta adanya budaya menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat pedesaan ([Bryman, 2016](#)).

Dalam konteks penelitian mengenai kepemimpinan lokal, bias semacam ini cukup umum terjadi karena responden sering kali merasa kurang nyaman dalam menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pemimpin yang memiliki kedekatan sosial maupun struktural dengan masyarakat ([Lincoln & Guba, 1985](#)). Meskipun demikian, peneliti telah berupaya meminimalkan potensi bias tersebut melalui penerapan teknik triangulasi data, observasi partisipatif, dokumentasi, serta *member check* guna meningkatkan validitas, kredibilitas, dan keakuratan hasil penelitian.

d. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam pengaruh budaya patriarki terhadap efektivitas kepemimpinan perempuan pada berbagai karakteristik desa yang berbeda. Selain itu, studi longitudinal mengenai transformasi penerimaan sosial masyarakat terhadap perempuan pemimpin desa juga penting dilakukan guna memahami perubahan relasi gender dalam tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Sungai Dua Indah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Efektivitas kepemimpinan tersebut tercermin melalui kemampuan kepala desa perempuan dalam mengintegrasikan dimensi *commitment*, *complexity*, dan *credibility* ke dalam praktik tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan perempuan di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membangun legitimasi sosial, mengelola konflik gender, dan melakukan negosiasi sosial dalam masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki (Mitrani & Arifin, 2020).

Pada dimensi *commitment*, penelitian ini menemukan bahwa kepala desa perempuan memiliki tingkat komitmen yang tinggi dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa. Komitmen tersebut tercermin melalui konsistensi pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keterlibatan aktif kepala desa dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kepala desa perempuan tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai administrator pemerintahan desa, tetapi juga berperan sebagai figur sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan partisipatif dan humanis yang diterapkan mampu memperkuat hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat sehingga membangun legitimasi sosial yang lebih kuat. Temuan ini sejalan dengan konsep *transformational leadership* yang dikemukakan oleh (Bass, 2020), bahwa efektivitas kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun hubungan emosional, motivasi kolektif, dan kedekatan sosial dengan masyarakat.

Pada dimensi *complexity*, penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa perempuan menghadapi berbagai tantangan sosial-budaya yang cukup kompleks, terutama berkaitan dengan konstruksi gender dan budaya patriarki yang masih berkembang dalam

masyarakat pedesaan. Bentuk resistensi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan terlihat melalui munculnya stereotip gender, keraguan terhadap kapasitas perempuan dalam memimpin, serta dominasi tokoh laki-laki dalam pengambilan keputusan informal desa. Selain itu, kepala desa perempuan juga menghadapi konflik gender berupa beban ganda antara tanggung jawab domestik dan tuntutan sebagai pemimpin publik. Kondisi tersebut memperkuat argumentasi (Rahmawati, 2022) yang menjelaskan bahwa perempuan dalam posisi kepemimpinan publik sering mengalami *role conflict* akibat adanya tuntutan sosial terhadap peran domestik dan peran publik secara bersamaan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kepala desa perempuan mampu mengatasi resistensi sosial dan konflik gender melalui strategi negosiasi sosial yang adaptif dan partisipatif. Strategi tersebut dilakukan melalui pembangunan komunikasi interpersonal dengan tokoh masyarakat, pelibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa, serta penerapan pendekatan persuasif yang tetap menghormati nilai dan struktur sosial lokal. Pendekatan tersebut secara bertahap mampu mentransformasikan resistensi masyarakat menjadi dukungan sosial terhadap kepemimpinan perempuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Krook & O'Brien, 2012) yang menjelaskan bahwa perempuan pemimpin di tingkat lokal cenderung menggunakan strategi *informal negotiation* dan *community engagement* untuk memperoleh legitimasi dalam masyarakat patriarkal.

Selanjutnya, pada dimensi *credibility*, penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa perempuan berhasil membangun tingkat kepercayaan publik yang tinggi melalui praktik pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Transparansi pengelolaan anggaran desa, keterbukaan informasi pembangunan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor utama dalam memperkuat legitimasi kepemimpinan kepala desa perempuan. Kredibilitas kepemimpinan tidak hanya dibangun melalui posisi formal sebagai kepala desa, tetapi juga melalui integritas personal, konsistensi pelayanan publik, dan kemampuan membangun relasi sosial yang dekat dengan masyarakat. Temuan ini mendukung pandangan (Koster & de la Fuente, 2021) yang menyatakan bahwa partisipasi publik, transparansi kelembagaan, dan akuntabilitas pemerintahan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat desa mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Perempuan tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif pemerintahan desa secara efektif, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan sosial melalui pendekatan kepemimpinan yang komunikatif, kolaboratif, dan humanis. Temuan ini memperkuat perspektif *gender leadership* yang menjelaskan bahwa perempuan pemimpin cenderung menggunakan pendekatan interpersonal dan partisipatif dalam membangun legitimasi kepemimpinan (Eagly & Carli, 2007).

Dengan demikian, kepemimpinan perempuan di tingkat desa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk representasi gender dalam politik lokal, tetapi juga

sebagai bagian dari transformasi sosial dalam pembangunan pemerintahan desa yang lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Women, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kepala desa perempuan melalui pelatihan kepemimpinan berbasis manajemen konflik sosial-budaya, strategi negosiasi gender, komunikasi politik lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan partisipatif guna meningkatkan efektivitas kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Pemerintahan Desa 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Bariroh, L., Ilmiyah, D., & Laviola, Z. (2024). Women Leaders and the Governance Revolution in Villages. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*, 4(1), 130–141. <https://doi.org/10.15642/sarpass.2024.4.1.130-141>
- Bass, B. M. (2020). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Sage Publications.
- Djanaan, F. M., Kasim, N. M., & Sarson, T. Z. (2024). Optimizing the Functions of the Village Consultative Body in the Realization of Democracy in Motabang Village. *Reformasi Hukum*, 28(2), 1055–1072. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i2.1055>
- Djanaan, R., Ahmad, F., & Yusuf, M. (2024). Leadership Commitment and Village Governance Effectiveness in Local Government Administration. *Journal of Public Administration Studies*, 12(1), 45–59. DOI tidak ditemukan/belum terverifikasi.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). *Through the Labyrinth: The Truth About How Women Become Leaders*. Harvard Business School Press.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Freitas, V. A. (2024). Atuação das Mulheres no Executivo Municipal: Uma Análise do Desempenho na Gestão Pública. *Revista Controle - Doutrina e Artigos*, 22(2), 354–390. <https://doi.org/10.32586/rcda.v22i2.925>
- Junaedi, J. (2023). Implementation of Village Governance Based on Principles of Good Governance of Public Service in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1), 249–266. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.160>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penguatan Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat*. Kemendagri.
- Koster, F., & de la Fuente, A. (2021). Public Trust and Local Governance Accountability in Rural Administration. *International Journal of Public Leadership*, 17(3), 211–225. <https://doi.org/10.1108/IJPL-02-2021-0015>
- Krook, M. L., & O'Brien, D. Z. (2012). All the President's Men? The Appointment of Female Cabinet Ministers Worldwide. *The Journal of Politics*, 74(3), 840–855. <https://doi.org/10.1017/S0022381612000382>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.

- Mitrani, R., & Arifin, Z. (2020). Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Desa dan Tantangan Budaya Patriarki. *Jurnal Politik Lokal*, 5(2), 115–127. DOI tidak ditemukan/belum terverifikasi.
- Nurcholis, H. (2017). *Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bee Media Pustaka.
- Parwoto, P., Wulaningru, P. D., Utami, T., & Larasati, O. (2024). Charismatic Leadership, Apparatus Competence, Legislative Role in the Implementation of Good Village Governance and Its Impact on Village Government Performance. *Proceedings of the 1st UHAMKA International Conference on Economics and Business*. <https://doi.org/10.4108/eai.18-12-2023.2350392>
- Rahmawati, D. (2022). Konflik Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Publik di Indonesia. *Jurnal Gender dan Politik*, 14(2), 101–115. DOI tidak ditemukan/belum terverifikasi.
- Rasaili, W., Suharyanto, D. F., Andiriyanto, A., Fitriyah, N. S., Zarnuji, & Puspaningrum, I. I. (2024). Independent Village Innovation: Integration of Agile Governance and Sustainable Development in Rural Governance. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.45-60>
- Rizki, T., & Kurniawan, S. (2023). Public Service Performance: An Influence of Female Leadership and Good Governance. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 443–452. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.443-452>
- Setiawan, D., & Nugroho, A. (2022). Dinamika Kepemimpinan Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–59. DOI tidak ditemukan/belum terverifikasi.
- Syukri, M. (2023). Gender Policies of the New Developmental State: The Case of Indonesian New Participatory Village Governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 110–133. <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>
- Women, U. N. (2021). *Women's Leadership in Local Governance*. United Nations Women.